



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : RSUD DR. ZAINOEL ABIDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISRA FIRMANSYAH
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 849290

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.807.000.000

1. Tanah Seluas 403 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. Tanah Seluas 509 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 113.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 733 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , WARISAN Rp. 1.233.000.000
5. Tanah Seluas 1026 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
6. Tanah Seluas 1161 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
7. Tanah Seluas 508 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , WARISAN Rp. 508.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 253 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , WARISAN Rp. 403.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 372.000.000

1. MOTOR, HONDA NF125 TD/SOLO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ GEB 1.5 E Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000



3. MOBIL, TOYOTA INNOVA V AT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
145.000.000

4. MOBIL, FORD EJEESCAPE XLT 3.0L 4X4 Tahun 2004, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 61.842.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 656.275.712

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.897.117.712

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.897.117.712

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.